

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam merupakan agama yang dapat mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, bukan hanya pada dimensi vertikal, yaitu hubungan antara manusia dengan tuhan (*habluminallah*), melainkan juga pada dimensi horizontal, yaitu hubungan antara manusia dengan sesama manusia (*hablumminannas*). Dalam Islam ada sebagian instrumen ekonomi yang berguna untuk memberikan bantuan mengenai kepentingan sosial berupa pemanfaatan dana zakat guna kesejahteraan umat.

Menilik realitas yang terjadi, permasalahan ekonomi akan terus terjadi dari masa ke masa jika dana zakat tidak dikelola dengan baik karena ekonomi merupakan salah satu faktor terpenting terhadap kemajuan suatu pemerintahan maka konsep kesejahteraan harus terus dikembangkan. Agar kesejahteraan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Zakat adalah instrumen penting dalam sektor ekonomi Islam yang dapat mendorong kemajuan dan kemakmuran umat Islam. Untuk itu, maka perlu diadakannya kebijakan khusus untuk meningkatkan kesejahteraan. Salah satunya adalah melibatkan Badan Amil Zakat dalam proses pengelolaannya. Keterlibatan Badan Amil Zakat dalam hal pengelolaan dan pendistribusian zakat sangat penting untuk menyalurkan dana zakat secara tepat kepada masyarakat yang membutuhkan guna meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Dalam substansi hukum Islam, yang memiliki tugas untuk mengambil dan menjemput zakat adalah para petugas zakat (amil). Amil salah satu profesi yang mulia, sama halnya dengan posisi nabi, ulama maupun pemerintah. Kemuliaan amil bukan hanya perpanjangan tangan dari Allah SWT saja yang berguna untuk mengelola amanah, melainkan menjadi media penghubung antara pihak yang memberi dana zakat (muzakki) dengan yang menerima dana zakat (mustahiq) (Ridwan, 2019).

Di Indonesia, zakat diatur secara khusus pengelolaannya pada UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Menurut regulasi tersebut pada pasal 1 ayat (7) dan (8) menyatakan terdapat 2 (dua) badan yang berhak mengelola zakat antara lain, yang pertama Badan Amil Zakat (BAZ) yang dikelola Lembaga Amil Zakat (LAZ) dijalankan oleh pemerintah dan dua komunitas. Dalam konteks kehidupan berbangsa, dua lembaga pengelola zakat memegang peranan penting dalam pengelolaan dana zakat, keduanya merupakan lembaga penting yang menentukan keberhasilan pengelolaan potensi ekonomi masyarakat Indonesia sangat berperan penting dalam mewujudkan syiar agama Islam. Sehingga kedua lembaga ini diharapkan mampu mengembangkan seluruh potensi manajerialnya agar tujuan utama pengelolaan zakat dapat tercapai. Adanya lembaga ini bertujuan menghimpun dana dari masyarakat yang berupa zakat, infaq, dan shadaqah (ZIS) yang akan disalurkan kembali pada masyarakat yang membutuhkan.

Dengan keluarnya UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat telah menjadi suatu gebrakan dan terobosan yang cukup baik bagi pengembangan pengelolaan zakat di Indonesia, meskipun kekurangan pada Undang-Undang tersebut yaitu tidak adanya sanksi pada warga negara yang tidak melakukan pembayaran zakat dan juga kurangnya pemberian insentif untuk warga negara yang telah melakukan pembayaran zakat. Namun dengan adanya Undang-Undang yang mengatur mengenai zakat menjadi sebuah inovasi baru dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Dalam pengelolaannya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibantu oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ). Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS yang berfungsi untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) wajib disetorkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) baik kepada BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota (Zaharullah, 2019).

Terdapat empat dasar yang menjadi awal mulanya rumusan pasal-pasal dan bunyi ayat dalam UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, diantaranya:

Pertama, memenuhi sistem terpadu (*unified system*) mengenai manajemen atau pengelolaan zakat. Kegiatan pengambilan atau pengumpulan zakat, penyaluran dan pemberdayaan zakat di Indonesia harus terintegrasi dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Badan Zakat Amil Nasional (BAZNAS) dirancang sebagai lembaga eksekutif pemerintah yang menghimpun atau mengelola zakat. Agama dan negara merupakan dasar guna kepentingan pengurusan zakat. Allah memberikan wewenang dalam hal pengumpulan dana zakat kepada amil maupun pemerintah. Dipahami bahwa setiap orang yang bertindak sebagai amil melakukan pengelolaan zakat wajib mendapatkan izin pejabat yang berkuasa atau berwenang. Sebaliknya ancaman pidana bagi setiap individu dengan sengaja bertindak sebagai amil tanpa izin pejabat yang berkuasa atau berwenang.

Kedua, hierarki dalam manajemen atau pengelolaan zakat. Pengelolaan dana zakat dilakukan secara bertahap oleh pengelola atau amil zakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pusat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) daerah serta Lembaga Amil Zakat (LAZ) ialah sebuah organisasi yang memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Perubahan fundamental lahirnya UU No. 23 Tahun 2011 termasuk pengelolaan zakat atau pengelolaan terkait hubungan antara Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) di berbagai tingkatan. Pengelola zakat memaparkan bentuk pengelolaan zakat berjenjang dalam laporan dan proses pertanggungjawaban yang dikirimkan ke Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) ke Presiden melalui Menteri Agama Republik Indonesia dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sekali dalam setahun.

Ketiga, kepatuhan atau pemenuhan (*compliance*) pada ketentuan syariat. Prinsip inilah yang melatarbelakangi klausul ini, yaitu untuk



memperoleh izin dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) harus memenuhi persyaratan organisasi kemasyarakatan Indonesia di bidang pendidikan dan kemasyarakatan yang terdaftar sebagai lembaga berbadan hukum sebagai norma dakwah. Mengingat pengelolaan muslim tidak bisa dilakukan oleh badan hukum di luar komunitas muslim.

Keempat, akuntabilitas (*accountability*) pengelolaan zakat. Manajemen atau pengelolaan dana zakat pada hakikatnya merupakan salah satu pekerjaan amanah yang harus dilakukan oleh amil zakat. Pengelolaan zakat menuntut akuntabilitas yang terpercaya pada institusi pengelolanya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas menjadi kunci berhasil atau tidak kepercayaan yang diberikan oleh muzakki untuk didayagunakan dan didistribusikan kepada para ashnaf (Suprima & Rahman, 2019).

Dana zakat yang diperoleh dari muzakki untuk di distribusikan kepada mustahiq yang memenuhi persyaratan akan dikelola oleh BAZNAS Kab. Kuningan yang bertujuan agar kesejahteraan mustahiq terwujud. Berikut jenis dana zakat yang diperoleh BAZNAS Kab. Kuningan.

**Tabel 1.1**

**Data Pengelolaan Berdasarkan Jenis Zakat di BAZNAS Kab. Kuningan**

| Tahun 2019    |               | Tahun 2020    |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jenis Zakat   | Jumlah        | Jenis Zakat   | Jumlah        |
| Zakat Profesi | 1.943.424.373 | Zakat Profesi | 1.673.501.150 |
| Zakat Maal    | 312.410.185   | Zakat Maal    | 129.056.080   |
| Zakat Fitrah  | 1.509.393.566 | Zakat Fitrah  | 876.946.269   |
| Bagi Hasil    | -             | Bagi Hasil    | 658.476       |
| Non Syariah   | -             | Non Syariah   | 232.028       |

Sumber: Laporan Perubahan Dana Zakat Periode 2019-2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah dana zakat dengan jenis zakat profesi, zakat maal dan zakat fitrah. Dilihat dari tabel, ketiga jenis zakat tersebut menjadi sumber dana yang paling efektif

sebagai sumber dana yang dapat digunakan untuk tujuan kesejahteraan mustahiq dibandingkan dengan jenis dana zakat lainnya.

Pendistribusian harta bagi orang yang mampu kepada orang yang membutuhkan dalam Islam diantaranya ialah melalui zakat, infaq dan shadaqah. Sistem zakat, infaq dan shadaqah sudah diatur secara jelas dalam ketentuan yang dijelaskan Alquran dan Hadits. Ketentuan ini dapat dipakai di berbagai zaman dan tidak terikat oleh waktu, seperti zakat, dalam Ilmu Fikih telah ditetapkan dengan jelas apa saja ketentuan mengenai jenis-jenis harta zakat, nisab, haul, cara kerja amal, baitul mal, mustahiq dan lainnya.

Pada prinsipnya, walaupun kewajiban zakat lebih terkait pada masing-masing pribadi muslim tetapi pada pelaksanaannya bukanlah semata-mata diserahkan pada kesadaran muzakki, namun hal ini merupakan persoalan kemasyarakatan. Oleh karena itu, diperlukan sebuah lembaga atau badan untuk mengatur pelaksanaannya, meliputi: mengkoordinir, mengumpulkan harta zakat dari muzakki (pemberi zakat) dan mendistribusikan dana zakat yang terkumpul kepada mereka yang berhak menerimanya.

Zakat yang telah berhasil dikumpulkan oleh amal zakat selanjutnya harus segera disalurkan kepada pihak yang wajib menerimanya sesuai dengan skala prioritas yang telah ditentukan. Agar tidak terjadi kesalahan dalam pendistribusian dana zakat kepada *mustahiq*, maka dana zakat hanya diperuntukan kepada 8 ashnaf yaitu fakir, miskin, amal, muallaf, riqab, gharimin, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Semakin baik zakat dikelola dan tepat sasaran dalam pendistribusiannya maka akan semakin mampu untuk meningkatkan kesejahteraan mustahiq.

Pendistribusian dana zakat dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, tergantung bagaimana mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh lembaga zakat. Target dari pendayagunaan dana zakat bukan hanya digunakan untuk menghabiskan kas yang ada, melainkan agar tercapainya dampak bagi sosial. Adapun dampak sosial dapat berupa peningkatan kesejahteraan

masyarakat, menambah jumlah masyarakat yang berpendidikan, mengurangi tingkat kenakalan remaja, dan lain sebagainya.

**Tabel 1.2**

**Data Pendistribusian Berdasarkan Ashnaf di BAZNAS Kab. Kuningan**

| Tahun 2019   |               | Tahun 2020   |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| Ashnaf       | Jumlah        | Ashnaf       | Jumlah        |
| Fakir Miskin | 2.310.450.654 | Fakir Miskin | 2.402.883.834 |
| Amil         | 238.495.870   | Amil         | 48.268.612    |
| Muallaf      | 3.150.000     | Muallaf      | 32.750.000    |
| Riqab        | 2.000.000     | Riqab        | -             |
| Gharimin     | 1.500.000     | Gharimin     | 3.113.683     |
| Fisabilillah | 1.151.620.640 | Fisabilillah | 868.470.384   |
| Ibnu Sabil   | 4.075.000     | Ibnu Sabil   | 4.800.000     |

Sumber: Laporan Perubahan Dana Zakat Periode 2019-2020

Berdasarkan tabel diatas yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah ashnaf fakir miskin. Dilihat dari tabel tersebut ashnaf fakir miskin menjadi ashnaf yang paling banyak mendapatkan manfaat dari dana zakat dibandingkan dengan ashnaf lainnya.

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi muzakki (pembayar zakat) dan mustahiq (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu, amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam al-Qur'an amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amilin (Zurnalis, Khairuddin, & Husna, 2019).

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu adanya pengelolaan dan pendistribusian dana zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh masyarakat bersama pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan pengelolaan zakat agar zakat menjadi sumber dana yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat terutama untuk mengentaskan dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial.

Kesejahteraan adalah keamanan, keselamatan, ketentraman, dan kesenangan hidup. Sedangkan mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat. Jadi kesejahteraan mustahiq berarti ketentraman dan kesenangan hidup yang diterima oleh yang berhak menerima zakat baik itu ketentraman dan kesenangan hidup secara lahir ataupun batin (Rahmatillah & Sari, 2019).

**Tabel 1.3**

**Data Jumlah Mustahiq Berdasarkan Ashnaf di BAZNAS Kab. Kuningan**

| Tahun 2019   |        | Tahun 2020   |        |
|--------------|--------|--------------|--------|
| Ashnaf       | Jumlah | Ashnaf       | Jumlah |
| Fakir Miskin | 2.823  | Fakir Miskin | 1.762  |
| Amil         | 196    | Amil         | 200    |
| Muallaf      | 9      | Muallaf      | 27     |
| Riqab        | 1      | Riqab        | -      |
| Gharimin     | 2      | Gharimin     | 5      |
| Fisabilillah | 2.164  | Fisabilillah | 1.690  |
| Ibnu Sabil   | 38     | Ibnu Sabil   | 41     |

Sumber: Laporan Kas Keluar Ashnaf Periode 2019-2020

Dengan melihat uraian di atas ada banyak faktor yang menentukan kesejahteraan mustahiq dan salah satu faktornya adalah pengelolaan dan pendistribusian. Seperti telah diuraikan di atas bahwa kedua faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Dan dalam hal ini penulis akan melakukan



penelitian terhadap ketiga variabel yang telah disebutkan, yaitu apakah pengelolaan dan pendistribusian berpengaruh pada kesejahteraan mustahiq, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENGELOLAAN DAN PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MUSTAHIQ PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KAB. KUNINGAN”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat teridentifikasi sebagai berikut:

### **1. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Lembaga Keuangan Syariah dan Pembangunan Nasional serta topik dalam bahasannya adalah Lembaga Keuangan Syariah dan Kesejahteraan Masyarakat.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif yang dilakukan pada Mustahiq di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

### **3. Jenis Masalah**

Jenis masalah yang akan dibahas adalah Pengaruh Pengelolaan dan Pendistribusian Dana Zakat Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

## **C. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari pelebaran dan kesalahpahaman dalam pembahasan ini, maka peneliti membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian dilakukan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan, sebagai objeknya adalah Mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.



2. Sesuai dengan judul, dalam penelitian ini peneliti hanya berfokus pada Pengelolaan, Pendistribusian Dana Zakat dan Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq.

#### **D. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan menjadi rumusan masalah dalam penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan dana zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan?
2. Apakah pendistribusian dana zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan?
3. Apakah pengelolaan dan pendistribusian dana zakat berpengaruh terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengelolaan dan pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

## **F. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan menambah pengetahuan serta dapat menjadi sumber informasi sekaligus bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh pengelolaan dan pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Lembaga**

Hasil laporan penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan evaluasi bagi Lembaga Keuangan Syariah khususnya Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

#### **b. Bagi Penulis**

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang diperoleh penulis selama duduk di bangku kuliah Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syekh Nurjati Cirebon. Serta menambah pengalaman berdasarkan kenyataan yang ada di lapangan, khususnya tentang pengaruh pengelolaan dan pendistribusian dana zakat terhadap peningkatan kesejahteraan mustahiq pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kab. Kuningan.

### **3. Secara Akademis**

Sebagai bahan untuk menambah ilmu pengetahuan bagi para akademisi dan dunia pendidikan pada umumnya, khususnya memberikan edukasi bagi perbankan syariah dan dapat memberikan bahan dan masukan serta referensi bagi penelitian yang dilakukan selanjutnya. Sebagai bahan referensi sekaligus bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 5 (lima) Bab, dimana setiap Bab memiliki sub bab yang menjelaskan lebih rinci mengenai bab tersebut. Agar penulisan skripsi ini sistematis dalam pembahasannya, maka penulis membuat suatu sistematika penulisan yakni sebagai berikut :

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam bab ini, akan membahas mengenai permasalahan penelitian diantaranya latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Dalam bab ini, akan membahas mengenai teori zakat, yakni meliputi pengertian pengelolaan, asas pengelolaan, tujuan pengelolaan, landasan hukum pengelolaan, organisasi dalam pengelolaan, pengertian pendistribusian, syarat-syarat mustahiq zakat, sifat pendistribusian, pengertian zakat, pengertian kesejahteraan mustahiq, fungsi kesejahteraan mustahiq, tingkat kesejahteraan mustahiq, dan kriteria tingkat kesejahteraan mustahiq berdasarkan Biro Pusat Statistik (BPS) dan Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dan berbagai referensi yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Menjelaskan pula mengenai penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Dalam bab metodologi penelitian, penelitian ini akan membahas mengenai tempat dan waktu penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang gambaran objek penelitian, gambaran umum responden, gambaran umum distribusi variabel, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.



#### BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang telah dipaparkan dalam bagian rumusan masalah, setelah melalui analisis pada bab sebelumnya. Sedangkan pada bagian saran ini berisi tentang rekomendasi dari penulis mengenai permasalahan yang diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.

NUTUP

